

Perubahan Iklim Indonesia Harus Ambil Bagian

Jakarta, Kompas - Deforestasi merupakan upaya yang harus mendapat perhatian besar. Negara tropis seperti Indonesia, dengan luasan hutan lebih dari 100 juta hektar, dinilai memegang kunci kestabilan iklim.

Sementara itu dalam menghadapi ancaman pemanasan global, dunia juga harus melihat cara lain di luar Protokol Kyoto dan harus melibatkan negara sebanyak mungkin dalam gerakan yang terkoordinasi.

Demikian diungkapkan peneliti senior dan Direktur Program Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan pada Resources for the Future (RFF) Roger A Sedjo di Jakarta, Rabu (13/8). Sedjo juga akan berkunjung, antara lain, ke Medan, Surabaya, dan Bogor.

Menurut dia, sesuai dengan sistem yang ada pada Protokol Kyoto terkait hutan, antara lain terkait masalah perdagangan, yaitu kredit karbon, carbon offset, dan karbon yang tersimpan di dalam hutan, maka Indonesia harus menjadi pemain (utama) karena hutan tropisnya yang luas.

Namun, Sedjo melihat bahwa masih ada resistensi untuk memasukkan isu hijau seperti deforestasi sebagai cara utama (major way). Yang masih disoroti adalah masalah energi dan hal lain di luar energi.

"Hal lain yang bisa dipelajari adalah jika isu ditekankan pada isu energi, maka akan sangat mahal dan sangat sulit," kata Sedjo.

Di sisi lain, upaya aforestasi dan deforestasi sesuai Protokol Kyoto belum berjalan maksimal karena hal itu merupakan persoalan kompleks dan bersifat jangka panjang.

"Harus dibahas lagi soal pengawasan dan pengukuran berapa emisi yang bisa dikurangi, juga ada masalah kalau ada "kebocoran" (di satu bagian hutan dijaga, di wilayah lain pohon ditebang sehingga emisi justru lebih besar).

"Semakin banyak negara menaruh perhatian pada persoalan deforestasi akan sangat positif," kata Sedjo. Dia mengatakan, "Sebanyak 20 persen emisi bisa ditangkap oleh hutan dalam 50 tahun ke depan."

Kontributor Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) 2007—tim tersebut mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian 2007—itu mengatakan, pada skema pasca-Protokol Kyoto, persoalan hutan harus mendapat penekanan lebih besar. Skema Protokol Kyoto akan selesai pada 2012.

Sementara itu, skema mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism/ CDM) diakui hasilnya belum terlalu signifikan karena pengurusannya yang amat birokratis.

AS bijaksana

Tentang posisi AS yang tidak meratifikasi Protokol Kyoto, menurut Sedjo, sikap itu bijaksana.

"Jika negara maju telah melakukan segalanya yang bisa dilakukan, namun negara berkembang tidak mengikuti langkah itu, kita hanya buang waktu. Jadi kondisi yang penting dalam menghadapi perubahan iklim adalah negara berkembang turut dan berpartisipasi sepenuhnya dalam proses itu. Menurut saya, posisi AS itu bijaksana," ujarnya.

"Alasan AS tidak meratifikasi karena negara berkembang besar India, China, dan juga Brasil, mereka masuk dalam Protokol namun tidak memasang target," tutur Sedjo. "Kita juga harus melihat yang di luar Protokol Kyoto. Saya yakin ini baru akan berhasil jika semakin banyak negara berbuat secara terkoordinasi," katanya. (GSA/ISW)